

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Bandung merupakan kota metropolitan yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan, sehingga kota Bandung menjadi kota dengan kepadatan penduduk yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan banyaknya penduduk yang ada di Kota Bandung, maka akan bertambah banyak pula masalah yang menghampiri, salah satunya adalah sampah.

Penanganan sampah di Kota Bandung dilaksanakan oleh PD Kebersihan Kota Bandung, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam usaha jasa pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bandung. PD Kebersihan didirikan pada Tahun 1985 sebagaimana tertuang dalam dalam Perda Kotamadya Daerah tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung jo Perda No. 15 Tahun 1993 dan terakhir telah diubah dengan Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang PD Kebersihan.

Meski belakangan ini PD. Kebersihan mendapat apresiasi lantaran berhasil menaikkan pendapatan retribusi dan mengantarkan kota Bandung kembali berhasil meraih Adipura, secara finansial kinerjanya masih belum memuaskan. Setiap tahun pemerintah kota Bandung masih harus memberikan subsidi hingga puluhan milyar.

Di kota Bandung selain PD. Kebersihan, perusahaan daerah lain yang berkinerja buruk adalah PD. Pasar Bermartabat. Pasalnya, PD. Pasar dinilai belum bisa menjalankan program *revitalisasi* pasar dan merugi hingga Rp. 5 Milyar. Seperti yang diungkapkan oleh Wali Kota Ridwan Kamil pada Koran Pikiran Rakyat Edisi Selasa, 12 Januari 2016 menyatakan bahwa: “Ridwan Kamil mengaku kecewa dengan kinerja PD. Pasar yang tidak menunjukkan kemajuan. Program *revitalisasi* pasar yang direncanakan jalan di tempat (bukan gagal, tapi belum jalan-jalan) saya kecewa saja.”

Selain itu, kondisi keuangan PD. Pasar tidak kunjung membaik. Tahun lalu, PD. Pasar menelan kerugian sampai 5 Milyar. Seharusnya, PD. Pasar tidak perlu menanggung kerugian sebesar itu. Selain keuangan, persoalan mengenai pengelolaan aset juga tidak berkembang. Serta masalah persoalan sertifikasi lahan-lahan pasar tidak menunjukkan kemajuan.

Menurut anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Endun Hamdun mengakui bahwa kinerja PD. Pasar tidak menggembirakan. Menurut dia, kinerja buruk itu berakar dari sertifikasi lahan pasar yang tidak kunjung selesai. Komisi B sendiri menyarankan agar PD. Pasar untuk tetap berkonsentrasi pada sertifikasi itu. Jumlah pasar yang belum tersertifikasi sebanyak 27 Pasar. Jumlah ini belum bertambah sampai tahun 2015 lalu. Baru sekitar 14 pasar dari 41 pasar tradisional di kota Bandung yang sudah bersertifikat. (Pikiran Rakyat edisi Selasa 12 Januari 2016).

Menurut Endun, pembangunan pasar tidak bisa dilakukan tanpa sertifikat. Pengurusan IMB dan izin lainnya memerlukan sertifikat. “daripada timbul masalah nantinya. Seperti pasar kosambi, sertifikat dibereskan dulu daripada nanti ada gugatan,” tuturnya seraya menambahkan pengurusan sertifikat harus bekerja sama dengan SKPD lain karena memerlukan waktu.

Sementara itu dari empat BUMD kota Bandung, kinerja paling baik ditunjukkan oleh PD. BPR Kota Bandung. Program kredit melati yang menjangkau sekitar 7.000 nasabah telah menghasilkan keuntungan sampai Rp 2 Milyar. Atas kinerja itu, pemerintah kota berencana mengucurkan dana pinjaman yang bisa memperbesar modal program kredit melati.

Sedangkan kinerja PDAM Tirtawening Kota Bandung masih perlu terus ditingkatkan. Menurut Walikota Bandung Ridwan Kamil, PDAM masih perlu bekerja keras mengatasi kebocoran air yang masih besar. Jika persoalan itu diatasi, pelayanan air masyarakat akan meningkat. (Pikiran Rakyat edisi Selasa 12 Januari 2016).

Belum memuaskannya kinerja BUMD kota Bandung tersebut, khususnya pada PD. Kebersihan dan PD. Pasar mengindikasikan masih rendahnya kinerja manajerial pada kedua perusahaan tersebut. Kinerja manajerial menunjukkan kemampuan dan prestasi seorang manajer dalam menjalankan organisasi untuk mewujudkan tujuan yang mengarah kepada ketercapaian pelayanan publik. Kepentingan kinerja manajerial dibutuhkan untuk menilai seberapa jauh lembaga/organisasi dapat menerapkan visi, misalnya agar pelayanan publik dapat terwujud.

Menurut Gustika Yolanda (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Sistem pengendalian organisasi pada pemerintahan juga sangat diperlukan guna mendapatkan kinerja aparat pemerintah yang baik. Sesuai mandat PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian ini dikenal sebagai sistem pengendalian internal pemerintah, namun pada dasarnya proses implementasi dari sistem pengendalian ini masih pada tahap sosialisasi dan penyiapan pedoman pelaksanaan.

Salah satu faktor yang menentukan pencapaian kinerja manajerial adalah Sistem Pengendalian internal. Menurut Arens (2011:316) Sistem Pengendalian Internal adalah kebijakan dan prosedur yang bertujuan melindungi aset perusahaan dari kesalahan-kesalahan pengguna, dan memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat. Sebuah sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan umum yang biasanya manajemen gunakan untuk merancang sistem pengendalian internal, yaitu pada keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Menurut Ompusunggu dalam jurnal ilmiah akuntansi menyatakan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal akan selalu berhubungan dengan manusia. Faktor manusia sebagai karyawan sangat vital untuk mendukung tercapainya tujuan sistem pengendalian internal. Sumber daya manusia ternyata

merupakan faktor yang tidak dapat dilepaskan dengan pelaksanaan suatu sistem pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal dapat dikatakan efektif apabila keamanan aktiva perusahaan terjamin, tidak terjadi pemborosan dan kecurangan-kecurangan atau manipulasi terhadap biaya, efisiensi dapat ditingkatkan serta prosedur-prosedur dan kebijakan yang telah digariskan manajemen dipatuhi oleh para pegawai.

Penelitian Ramandei (2009) tentang pengaruh karakteristik anggaran dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah daerah studi empiris pada SKPD kota Jayapura yang hasil penelitiannya bahwa karakteristik sasaran anggaran (partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran) tidak berpengaruh terhadap Kinerja manajerial. Sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah daerah kota Jayapura.

Penelitian Nur Afrida (2013) tentang pengaruh desentralisasi dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja manajerial SKPD studi empiris pada pemerintah kota Padang yang hasil penelitiannya bahwa desentralisasi dan Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

Penelitian Gustika Yolanda Putri (2013) tentang pengaruh komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kinerja manajerial SKPD studi empiris pada SKPD kota Padang yang hasil penelitiannya bahwa pengaruh komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

Penelitian Robert Dwi Vano (2013) tentang pengaruh penerapan *Total Quality Management (TQM)*, Gaya manajemen dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja manajerial studi empiris pada Hotel di kota Padang yang hasil penelitiannya penerapan TQM tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap

kinerja manajerial pada jasa perhotelan di kota Padang, penerapan gaya manajemen berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja manajerial pada jasa perhotelan di kota Padang, dan penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja manajerial pada jasa perhotelan di kota Padang.

Penelitian Sumarno, SE (2006) tentang pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja manajerial studi kasus pada perusahaan pelayaran di Semarang yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komponen sistem pengendalian internal (partisipasi penetapan standar, insentif berdasarkan standar dan keketatan standar) mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja manajerial.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Sumarno, SE (2006) tentang pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja manajerial. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya lebih banyak meneliti pada SKPD dan Pemerintah Kotanya, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada BUMD Kota Bandung, khususnya pada Perusahaan Daerah yang tahun ini dinilai masih mengalami kinerja yang kurang baik, yakni PD. Kebersihan dan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada Perusahaan Daerah Kebersihan dan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pada PD. kebersihan dan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung?
2. Bagaimana Kinerja Manajerial PD. kebersihan dan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung?

3. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Manjerial Pada PD. kebersihan dan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Kinerja Manajerial Pada PD. Kebersihan dan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian berfungsi untuk menentukan arah pencapaian suatu permasalahan dalam penelitian. Tujuan penelitian penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pada PD. kebersihan dan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Manajerial PD. kebersihan dan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung
- c. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Manajerial Pada PD. kebersihan dan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung.